



Peran Strategis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pembangunan Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Disampaikan pada Konferensi Kuartalan IndonesiaX ke-12 dengan
Tema “Government Procurement Procedures: 2019 Onward”

Jakarta, 25 Juni 2019

Sistematika

1. Pengantar
2. Visi Indonesia 2045
3. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2020
5. Peran Strategis Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengantar

UUD 45 (VISI MISI ABADI)



VISI

Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur

MISI

- Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
- Memajukan Kesejahteraan Umum
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial



RPJPN (Visi Misi Interim, 2005-2025)

RPJMN
(2004-2009)



RPJMN
(2010-2014)



RPJMN
(2015-2019)

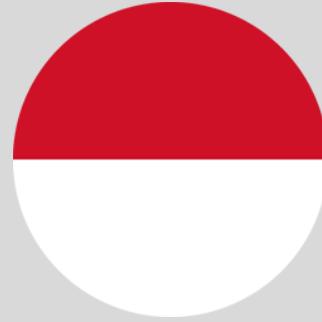


RPJMN
(2020-2024)

dst ...



VISI INDONESIA 2025 RPJMN 2005-2025



INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR



MANDIRI

Mampu mewujudkan kehidupan
sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan
mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan
sendiri.



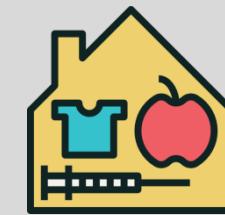
MAJU

Diukur dari kualitas SDM,
tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan
kelembagaan politik dan
hukum.



ADIL

Tidak ada
pembatasan/diskriminasi
dalam bentuk apapun, baik
antar individu, gender,
maupun wilayah.



MAKMUR

Terpenuhi seluruh kebutuhan
hidupnya, sehingga dapat
memberikan makna dan arti
penting bagi bangsa-bangsa
lain.

Capaian Bidang SDM, Kependudukan, Iptek, dan Kebudayaan

1



2



3



4



5



6



7



**Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
meningkat.**



Kependudukan

Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan meningkat.

TFR
2003 : 2,63
2015 : 2,28*

*SUPAS

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah meningkat.
2005: 7,30 tahun
2017: 8,45 tahun

Angka Melek Huruf meningkat.
2005: 90,9 %
2017: 95,50 %

Kesehatan

Angka Kematian Ibu menurun.
2010: 346
2015: 305 (per 100.000 kelahiran hidup)

Stunting Baduta menurun.
2013: 37,2%
2016: 26,1%

Kepesertaan JKN meningkat.
2015: 156,8 juta jiwa
2018: 207,8 juta jiwa

Iptek

Peringkat Global Competitiveness Index (GCI) naik.

2005-2006: 69
2017-2018: 36

Kebudayaan

Kontribusi ekonomi kreatif berbasis seni budaya terhadap PDB meningkat.

2010: Rp 525,96 Triliun
2016: Rp 922,59 Triliun

Kesetaraan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat.

2010: 68,15%
2017: 71,74%

Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung

1

Transportasi

Konektivitas Laut dan Multimoda

Dwelling Time (hari)	Panjang Jalan Tol (km)
2014 = 6-7	
2018 = 4-5	

Jumlah Pelabuhan (lokasi)	Panjang Jalan Nasional (km) kumulatif
2005 = 193	2005 = 26.866
2018 = 340	2018 = 47.017

Angkutan Laut Perintis (rute)	Jumlah Bandar Udara (lokasi)
2005 = 48	2005 = 187
2018 = 152	2018 = 254

Transportasi Perkotaan

Pembangunan Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Rel*	2014 = 3 kota
	2018 = 9 kota

Pembangunan Bus Rapid Transit dan Sistem Transit	2005 = 3 kota
	2018 = 25 kota



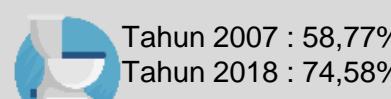
2

Perumahan Permukiman

Capaian Akses Air Minum



Capaian Akses Sanitasi

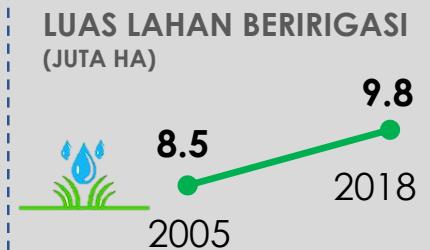
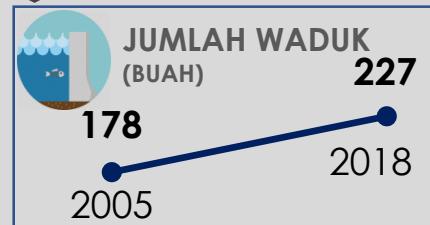


Kontribusi dalam Penyediaan Perumahan Layak



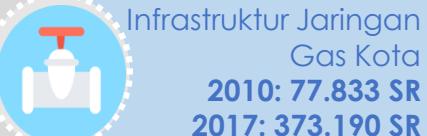
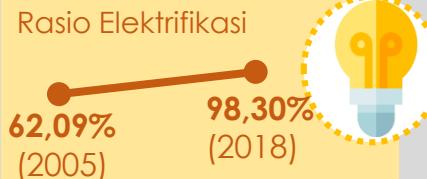
3

Sumber Daya Air



4

Energi dan Ketenagalistrikan



5

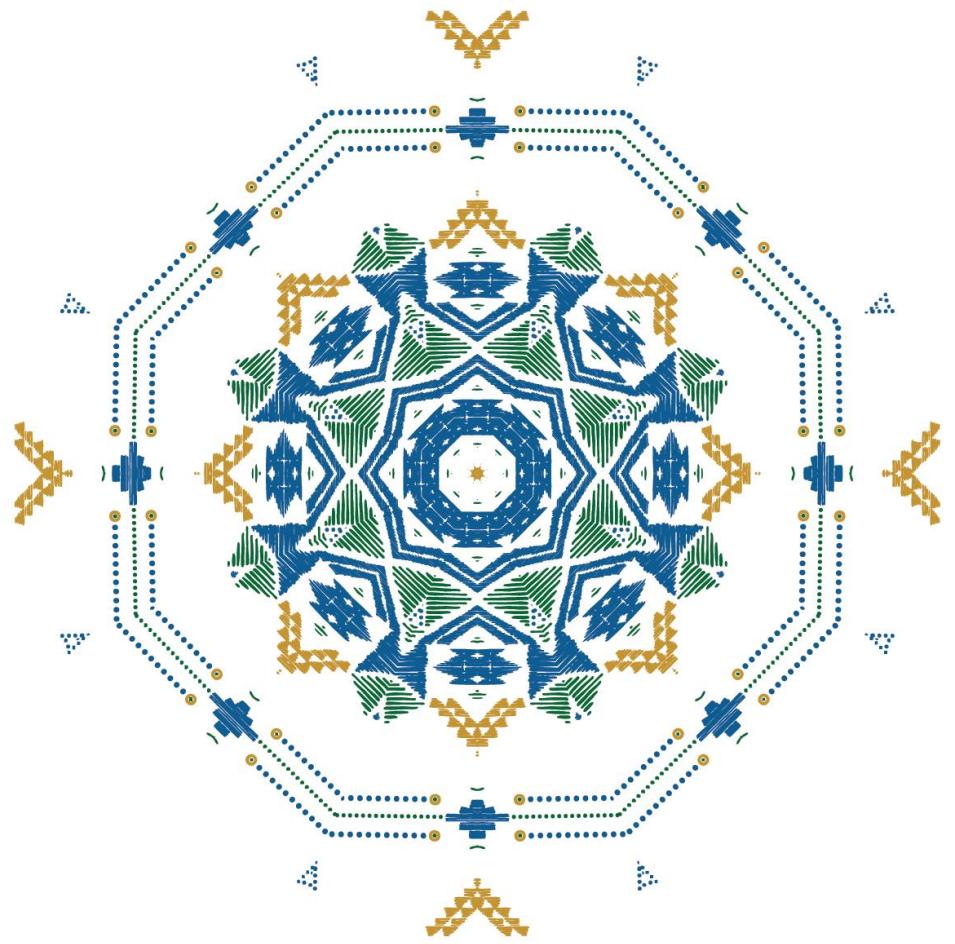
TIK



2. Visi Indonesia 2045



Kementerian PPN/
Bappenas



Indonesia

20 45

Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur



MEGATREN DUNIA 2045

Demografi Global

Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.

Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan berperan dalam meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

Peranan Emerging Economies

Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total *output* dunia dengan Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

Perdagangan Internasional

Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Aset keuangan *emerging economies* tahun 2050 diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang.

Kelas Menengah

Pada tahun 2050, jumlah *middle* dan *upper income class* diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.



Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peran ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.

Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik, serta *artificial intelligence*.

Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi, rata-rata suhu global akan meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini.

Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peran Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur



Manusia Indonesia yang
unggul, berbudaya, serta
menguasai Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi



Ekonomi yang maju
dan berkelanjutan



Pembangunan yang
merata dan inklusif



Negara yang
demokratis, kuat,
dan bersih

Pilar Pembangunan Indonesia 2045

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK



Percepatan pendidikan rakyat
Indonesia secara merata



Peningkatan peran
kebudayaan dalam
pembangunan



Peningkatan sumbangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam
pembangunan



Peningkatan derajat
kesehatan dan kualitas
hidup rakyat



Reformasi ketenagakerjaan

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN



Peningkatan investasi dan
perdagangan luar negeri



Percepatan industri dan
pariwisata



Pembangunan ekonomi
maritim



Pemantapan ketahanan pangan
dan peningkatan kesejahteraan
petani



Pemantapan ketahanan
energi dan air



Komitmen terhadap
lingkungan hidup

PEMERATAAN PEMBANGUNAN



Percepatan pengentasan
kemiskinan



Pemerataan kesempatan
usaha dan pendapatan



Pemerataan pembangunan
wilayah



Pembangunan infrastruktur
yang merata dan terintegrasi

PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN



Demokrasi substantif



Reformasi kelembagaan
dan birokrasi



Penguatan sistem hukum
nasional dan antikorupsi



Politik luar negeri
bebas aktif



Penguatan ketahanan
dan keamanan

Indonesia Menuju Negara Pendapatan Tinggi dan Salah Satu PDB Terbesar Dunia

Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Skenario Pertumbuhan Ekonomi

1986 - 2015		SKENARIO 2016 - 2045**	
		Dasar	Tinggi
5,1	Pertumbuhan Ekonomi	5,1	5,7
16	Peringkat PDB Dunia*	7	5
3.378	PDB per kapita* dalam USD	19.794	23.199
	Tahun menjadi Negara Pendapatan Tertinggi	2038	2036
32,8	Peranan Investasi*	33,1	38,1
6,4	Pertumbuhan	5,4	6,4
21,1	Peranan Industri*	22,5	26,0
6,3	Pertumbuhan	5,2	6,3
13,5	Peranan Pertanian*	7,8	7,4
3,1	Pertumbuhan	3,0	3,2

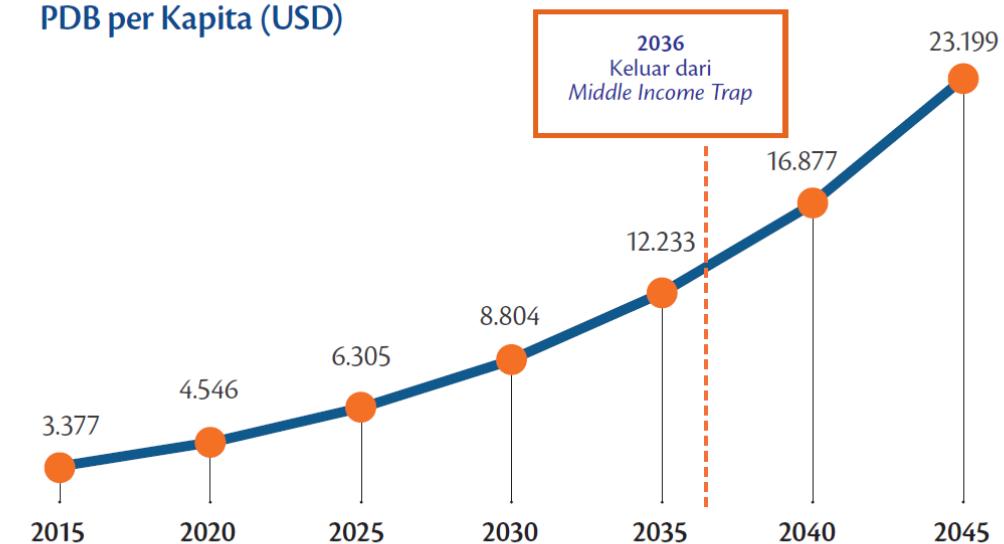
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

*) Akhir periode

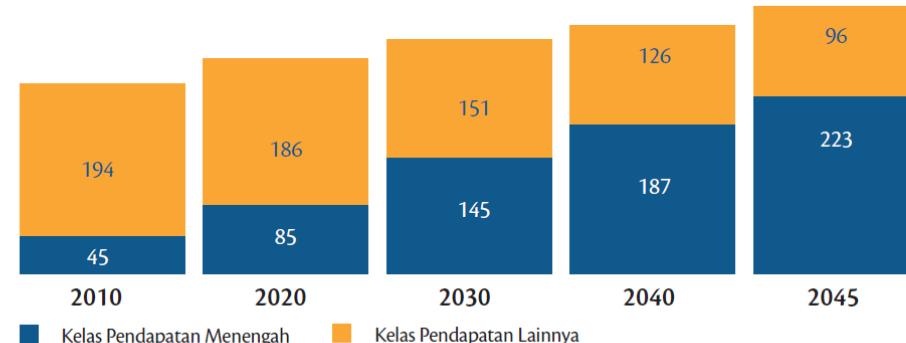
**) Dasar: Pertumbuhan ekonomi dunia rendah serta reformasi struktural berjalan *business as usual*

Tinggi: Reformasi struktural berjalan seperti diharapkan serta pertumbuhan ekonomi dunia relatif tinggi.

PDB per Kapita (USD)



Kelas Pendapatan Menengah Indonesia (juta orang)



Demografi dan Urbanisasi

2010

2045

(SUPAS 2015)

238,5

Jumlah Penduduk
(Juta)

318,9

69,8

Harapan Hidup
(Tahun)

75,5

11,9

Jumlah Lansia (65+)
(juta)

44,9

49,9%

Penduduk Tinggal
di Perkotaan

72,8%

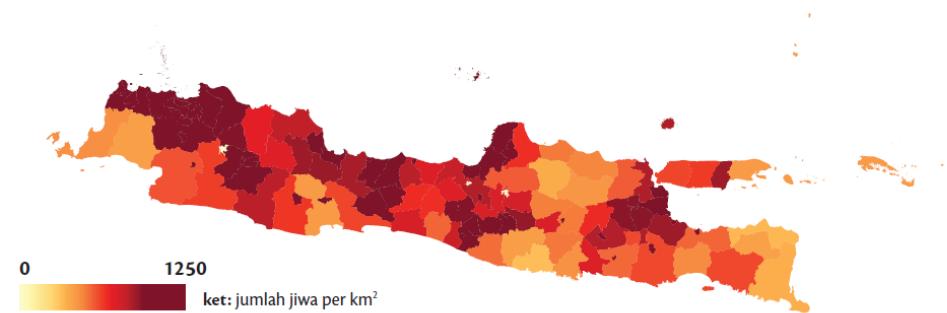
Rasio Ketergantungan tahun 2015 - 2045



Dalam periode 2010-2045, jumlah penduduk Indonesia usia produktif besar.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai tingkat terendah sekitar tahun 2022. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta. Dalam jangka panjang, *Total Fertility Rate* (TFR) dijaga pada tingkat 2,1 agar penduduk dapat tumbuh seimbang.

Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban. Pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi 72,8 persen.



Pada tahun 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta orang.

Daya dukung Jawa terutama Jakarta yang semakin turun memerlukan pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa. Jakarta tetap berkembang sebagai pusat bisnis dan keuangan.

1.1

Pendidikan dan Kebudayaan

Taraf pendidikan rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan SDM unggul dan berbudaya. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2045. Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi mencapai 60 persen dan angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan PT mencapai 90 persen pada tahun 2045.

Peningkatan pendidikan vokasi dan penyelarasan pengembangan ilmu di perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dan industri) yang kuat. Tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan dalam pasar kerja yang kompetitif.

Peran kebudayaan dalam pembangunan ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia. Jati diri bangsa Indonesia dan budaya bangsa diperkuat untuk memperkokoh akar kebudayaan Indonesia di tengah arus globalisasi.



Kualitas dan Layanan Pendidikan Merata



Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan



Profesionalisme Guru dan Perubahan Metode Pembelajaran



Budaya Sekolah dan Baca



Pendidikan Vokasi, Entrepreneurship, dan Karakter.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

	2015	2025	2035	2045
Rata-rata Lama Sekolah	8,3 Tahun	9,5 Tahun	10,7 Tahun	12,0 Tahun
APK Perguruan Tinggi	29,9%	35%	50%	60%
Angkatan Kerja Lulusan SMA sederajat dan PT	39,3%	50%	70%	90%

Strategi Pembangunan Pendidikan

1.4

Ketenagakerjaan

Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja yang semakin baik. Pasar tenaga kerja perlu fleksibel dan adaptif.

Partisipasi tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan meningkat, tingkat pendidikan tenaga kerja membaik, peranan tenaga kerja informal menurun, dan tenaga kerja di sektor pertanian berkurang dengan kesejahteraan yang lebih baik. Pengangguran akan terjaga pada tingkat *natural unemployment* (3-4 persen).

Reformasi ketenagakerjaan ke depan diarahkan pada tiga tahap sebagaimana bagan berikut.

	2015	2045
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,8%	78%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48,9%	65%
Angkatan Kerja (juta orang)	122,4	197,2
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,2%	3-4%
Porsi Tenaga Kerja Sektor Pertanian	32,9%	13%
Angkatan Kerja dengan Pendidikan SMA ke atas	39,3%	90%

Tahap Reformasi Ketenagakerjaan

01

2016 - 2025

Reformasi menuju pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif.
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industri.

02

2026 - 2035

Penguatan transisi lapangan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi.
Penguatan relevansi terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi.

03

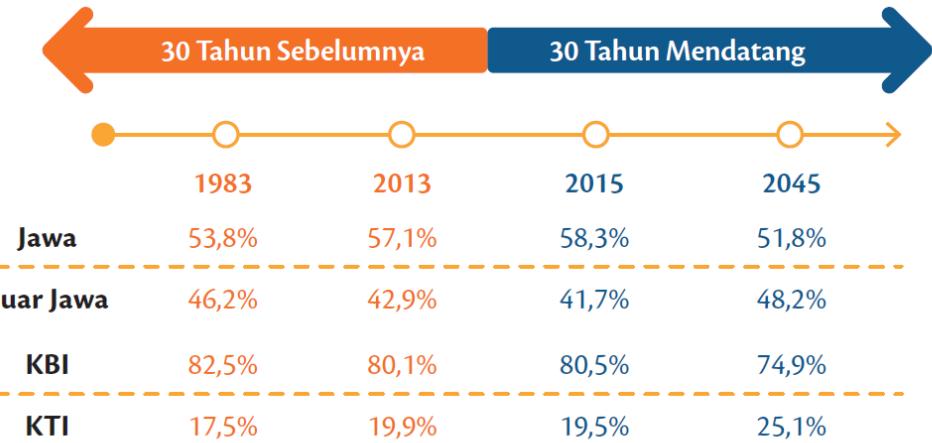
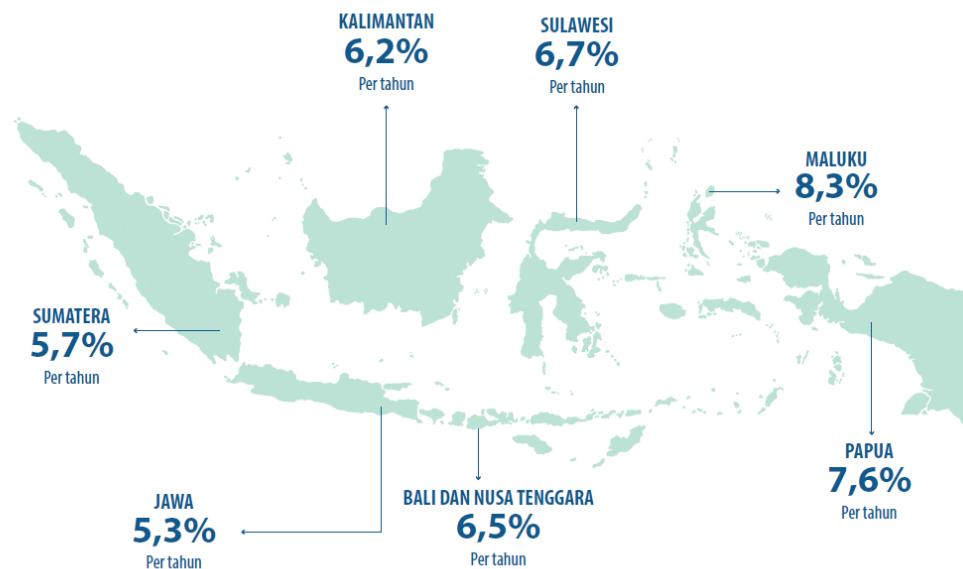
2036 - 2045

Pemantapan sistem pelatihan dan sertifikasi di seluruh sektor ekonomi serta transisi lapangan kerja.
Perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan secara universal.

3.2

Pemerataan Pembangunan Daerah

Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Wilayah Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Dalam 30 tahun ke depan, peranan Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 48,2 persen dan 25,1 persen dari perekonomian nasional.



Arah Pengembangan Daerah

Papua Basis Pangan Nasional & Sektor Ekonomi Berbasis SDA

Bali, Nusa Tenggara & Maluku Basis Wisata Internasional & Perikanan Nasional

Sulawesi Basis Industri Pangan & Gerbang KTI

Kalimantan Basis Industri Pengolahan & Lumbung Energi Nasional

Jawa Basis Perdagangan & Jasa

Sumatera Basis Industri Baru & Gerbang Kawasan Asia

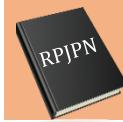
3. RPJMN 2020-2025 (RANCANGAN TEKNOKRATIK)

VISI 2045

INDONESIA
2045

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur

2020-2024



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TEMA



Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA

1

Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

2

SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

3

Pembangunan Karakter Bangsa



FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI

1

Pangan

2

Energi

3

Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital

4

Industri Manufaktur

5

Kelautan dan Kemaritiman



FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

1

Sentra-Sentra Pertumbuhan

2

Komoditas Unggulan Daerah

3

Pertumbuhan Perkotaan



FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1

Transportasi

2

Telekomunikasi

3

Sumber Daya Air

4

Perumahan dan Pemukiman



FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

1

Hukum dan Regulasi

2

Pertahanan dan Keamanan

3

Politik

Development Constraints :

Kondisi Pembiayaan

Kondisi Sumber Daya Alam

PENGARUSUTAMAAN



Kesetaraan Gender



Tata Kelola



Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim



Modal Sosial Budaya



Transformasi Digital

Kaidah Pembangunan :

Membangun Kemandirian

Menjamin Keadilan

Menjaga Keberlanjutan

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”



Berpenghasilan Menengah-Tinggi

- Transformasi struktural berjalan.
- Produktivitas tenaga kerja meningkat.
- Iklim investasi kondusif.
- GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055.



Sejahtera

- Pertumbuhan penduduk seimbang.
- Kualitas hidup meningkat.
- Perilaku disiplin dan beradab.
- SDM berkualitas dan berdaya saing.



Adil

- Ketimpangan menurun.
- Redistribusi berjalan baik.



Berkesinambungan

- RPJMN memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*).
- RPJMN selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional (SDGs).

Pengarusutamaan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024



Kesetaraan Gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.



Tata Kelola Pemerintah. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.



Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.



Modal Sosial dan Budaya. Modal sosial dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.



Transformasi Digital. Transformasi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

Selanjutnya pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan 3 kaidah pembangunan:

Membangun Kemandirian.



Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia

Menjamin Keadilan.



Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur

Menjaga Keberlanjutan.



Memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang

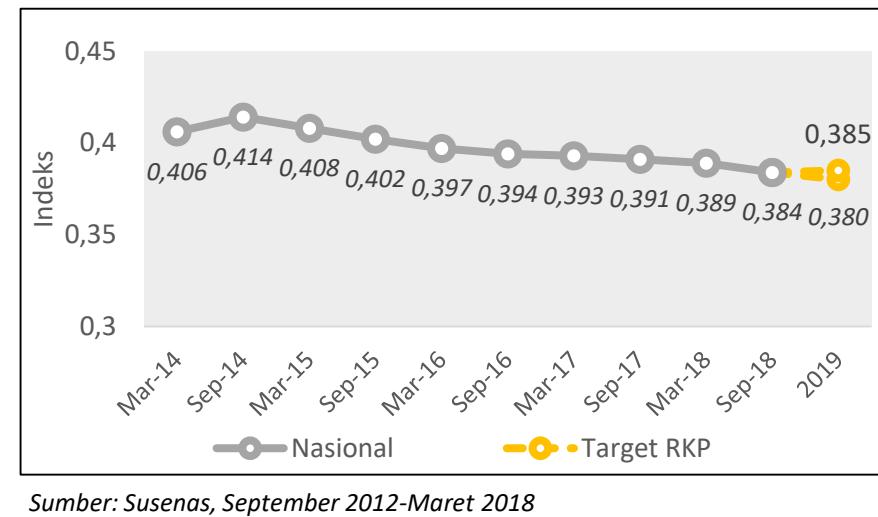
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2020



Pencapaian Pembangunan

**ANGKA
KETIMPANGAN**
turun menjadi
0,384

dan semakin membaik



INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA

naik menjadi

71,39

69,55 (2015) → **71,39** (2018)

Sumber: Bappenas dan BPS
(perhitungan dengan
metode baru)



**TINGKAT
PENGANGGURAN**
turun menjadi
5,34%

6,18% → **5,34%**
(2015) (2018)

Sumber: Sakernas, Agustus 2018

Catatan: Sakernas Februari 2019 menyebutkan bahwa telah tercipta 2,29 juta lapangan kerja,
sehingga TPT menjadi 5,01%.

Tingkat kemiskinan turun menjadi **9,66%** dan jumlah penduduk
miskin berkurang menjadi **25,67 juta jiwa***.



Percentase penduduk miskin berkurang
(persen)

10,96
2014 (Sept)

9,66
2018 (Sept)

Jumlah penduduk miskin berkurang
(juta jiwa)

27,73
2014 (Sept)

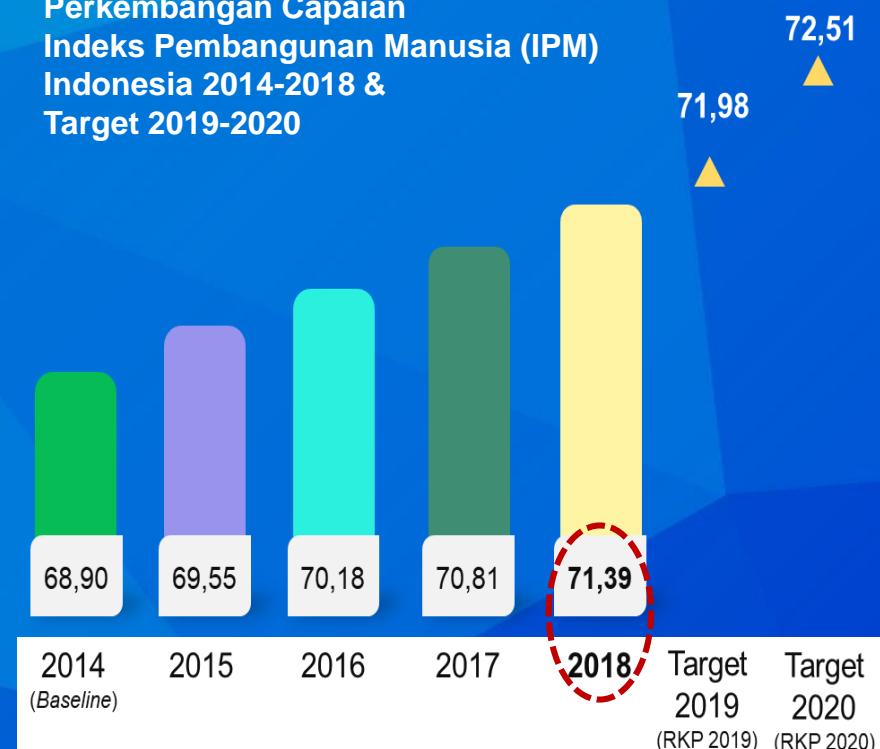
25,67
2018 (Sept)

Sumber: Susenas, September 2018



IPM Indonesia terus Meningkat dan Sudah Masuk Kategori Tinggi

Perkembangan Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia 2014-2018 &
Target 2019-2020



Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru)

Capaian Komponen Pembentuk IPM Tahun 2018 & Target 2019-2020



Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat

71,20 tahun (Capaian 2018) ➤ **71,30 tahun** (Target 2019) ➤ **71,47 tahun** (Target 2020)



Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat

8,17 tahun (Capaian 2018) ➤ **8,30 tahun** (Target 2019) ➤ **8,39 tahun** (Target 2020)



Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat

12,91 tahun (Capaian 2018) ➤ **13,21 tahun** (Target 2019) ➤ **13,41 tahun** (Target 2020)

Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat
(dalam ribu rupiah)

11.059 (Capaian 2018) ➤ **11.131** (Target 2019) ➤ **11.283** (Target 2020)



Target Pembangunan Tahun 2020

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
(nilai)

72,51



Tingkat Kemiskinan
(persen)

8,5 – 9,0

Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,2 - 5,5



Gini Rasio
(indeks)

0,375 – 0,380

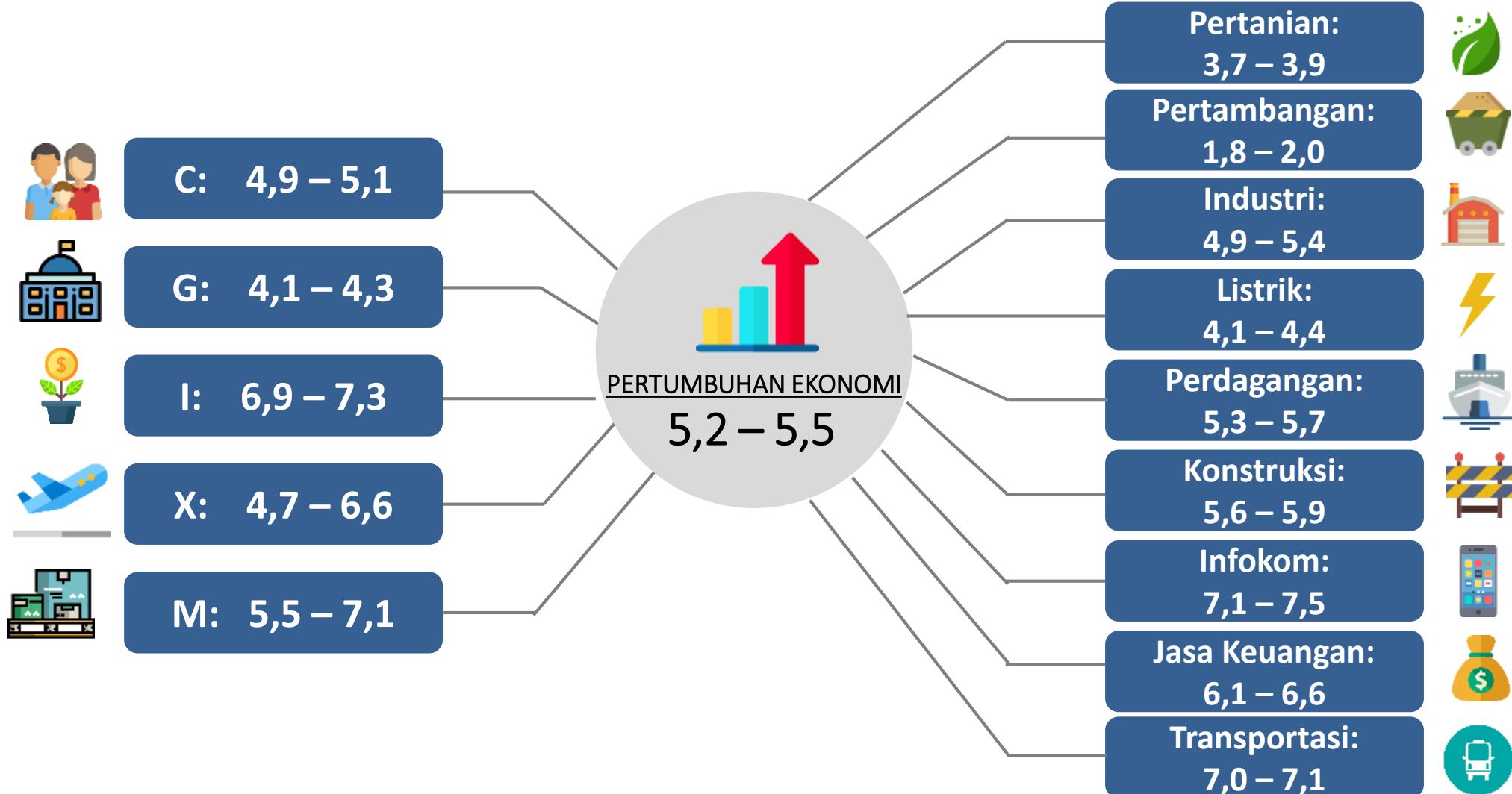
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
(persen)

4,8-5,1





Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020





Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

TEMA:

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”





Kerangka Pendanaan

RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024, untuk itu dilakukan :

- Reviu efektivitas dan efisiensi program
- Reviu/Identifikasi kontribusi Masyarakat-Dunia Usaha-BUMN-Pemerintah dalam pendanaan program

Pemangku
Kepentingan

MASYARAKAT

Melalui CSR,
filantropis, waqaf, ZIS

Mekanisme

Mendukung prioritas
pembangunan.

DUNIA USAHA

Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha
(KPBU) dan
Pembiayaan Investasi
Non Anggaran
Pemerintah (PIN)

Infrastruktur ekonomi dan
sosial yang memiliki
kelayakan ekonomi.

Keterangan

BUMN

Penugasan
kepada BUMN

- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

PEMERINTAH

APBN : Memperkuat pengendalian
melalui penyiapan Proyek Prioritas
("satuan 3")

APBD : Mengembangkan *output based transfer* melalui DAK Penugasan dan
Hibah Daerah untuk mengamankan
prioritas pembangunan di daerah

Dirarahkan utamanya pada:

- Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam).
- Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan)
dengan Standar Pelayanan Minimal.

5. Peran Strategis Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Pencapaian Sasaran Pembangunan

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

PASAL 59 PERPRES 95/2018



KETUA

Menteri PANRB

- Mengoordinasikan seluruh aktivitas SPBE Nasional
- Mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan
- Menetapkan aplikasi umum
- Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan

ANGGOTA

Menteri PPN/ Bappenas

- Mengoodinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Menteri Kominfo

- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi
- Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK
- Kebijakan umum audit TIK
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

Menteri Dagri

- Mengoordinasikan proses bisnis Pemda
- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda

Menteri Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional

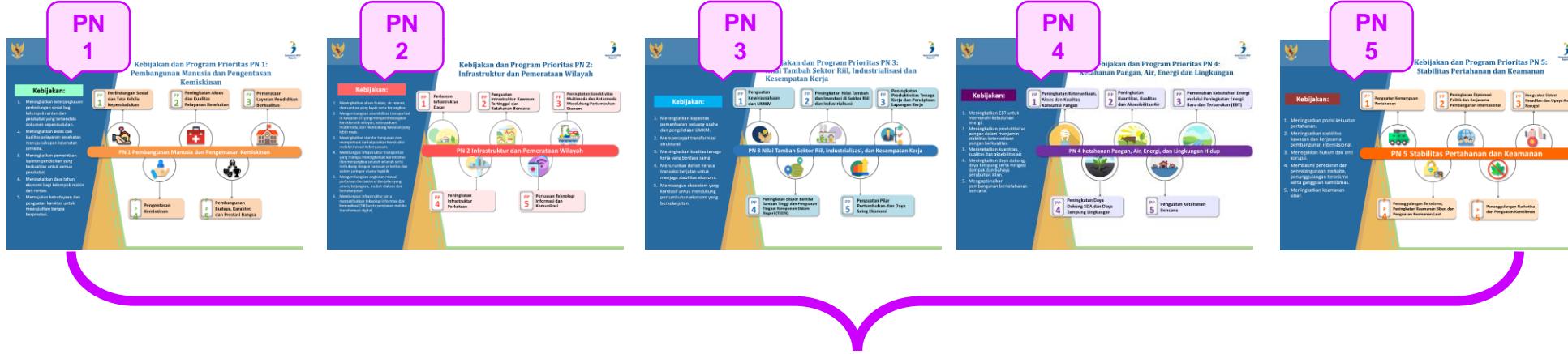
Kepala BSSN

- Melaksanakan pengamanan SPBE
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE

Kepala BPPT

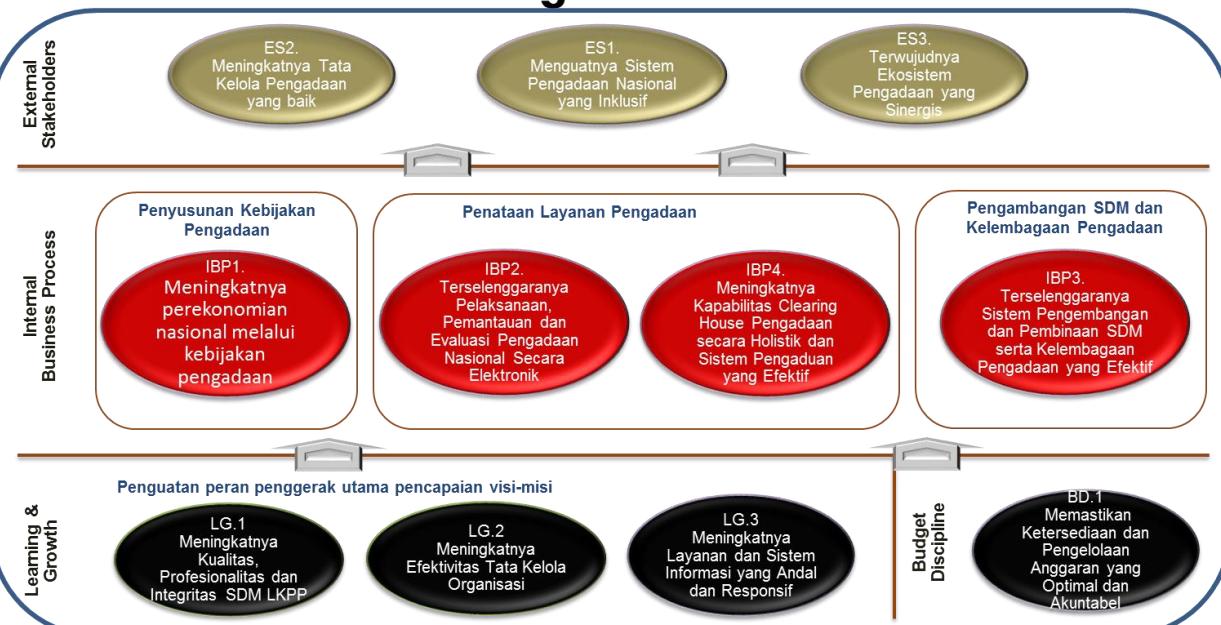
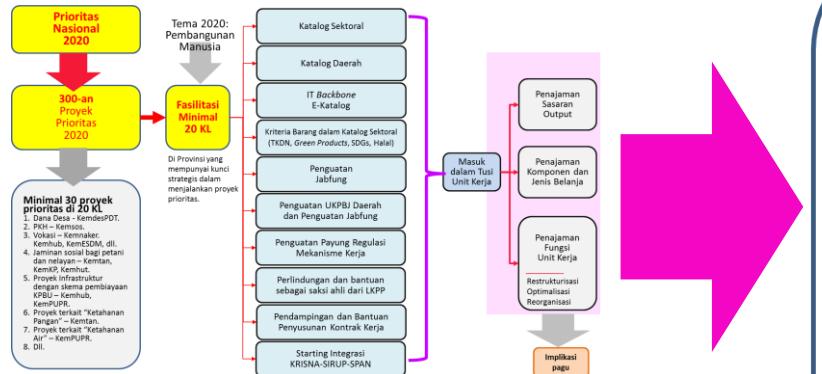
- Melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum
- Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi

Peran Strategis PBJ dalam Pembangunan Nasional



Perlu dukungan PBJ yang handal dan efisien

Rumusan Peta Strategis LKPP Tahun 2020-2024



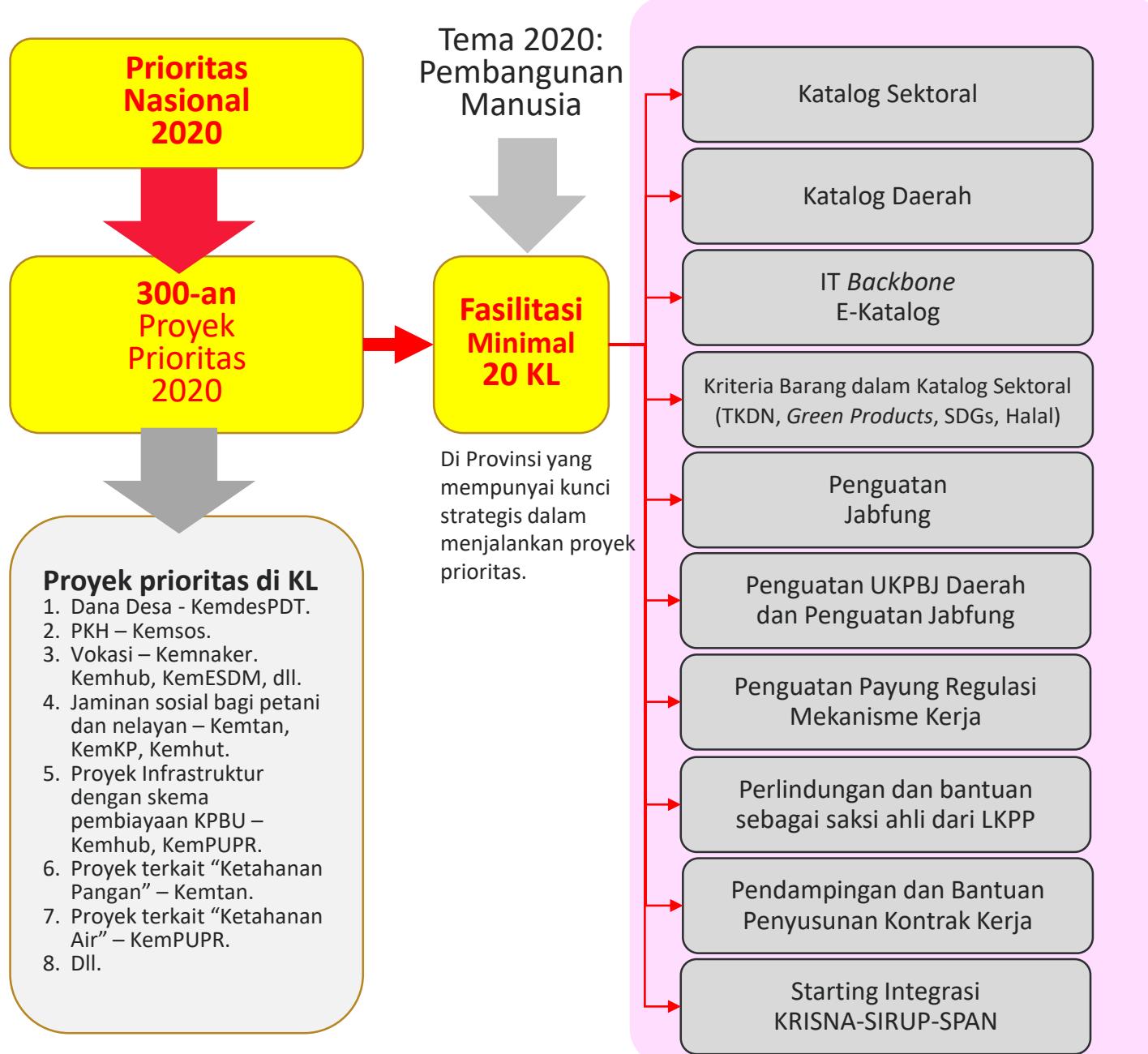
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diarahkan pada:

1. Penerapan *policy mix* antara *demand side* dan *supply side* di sektor industri pengolahan guna menciptakan nilai tambah ekonomi.
 - *Cognitive procurement* dengan *artificial intelligence* untuk mendekripsi kebutuhan barang/jasa pemerintah
 - Kerjasama N-Helix (Pemerintah-Perguruan Tinggi-Swasta/Industri-Masyarakat-Individu untuk mengembangkan inovasi pengadaan.
 - Pemberian insentif fiskal bagi R&D.
2. Peningkatan peran dan daya saing UKM, industri dalam negeri, serta pelaku usaha dalam pengadaan barang jasa pemerintah.
 - Kebijakan peningkatan kapasitas UMKM dalam pengadaan.
 - Pengembangan kemitraan dengan industri dalam negeri.
3. Pembinaan terhadap SDM pengadaan khususnya di daerah
 - Metode pembelajaran di daerah terpencil dan secara demografi sukar dijangkau akan lebih secara *remote learning*.
 - KPBU yang melibatkan pemerintah daerah dan BUMD.
4. Penerapan 100% *e-procurement* dan penyederhanaan syarat/prosedur pengadaan.

Memberikan Dampak

- 1 Pelaksanaan kegiatan proyek prioritas terlaksana lebih cepat, efisien, dan transparan.
- 2 Berkontribusi pada peningkatan peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Index* 4.0.
- 3 Percepatan realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan proyek prioritas secara efisien dan akuntabel.

Peran PBJ dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Prioritas 2020





Kementerian PPN/
Bappenas

TERIMA KASIH